



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : KHAIRUNNISA
2. Jabatan : DEKAN
3. NHK : 503551

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **830.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 157 m2/54 m2 di KOTA MEDAN ,
HASIL SENDIRI Rp. 370.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/75 m2 di KOTA MEDAN ,
HASIL SENDIRI Rp. 460.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **98.000.000**

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI
Rp. 4.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI
Rp. 4.000.000
3. MOBIL, NISSAN GRAND LIVINA MATIC Tahun 2017, HASIL
SENDIRI Rp. 70.000.000
4. MOTOR, HONDA F1C02N46L0A/T Tahun 2024, HASIL SENDIRI
Rp. 20.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **115.884.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **257.926.787**

F. HARTA LAINNYA **Rp.** **----**

Sub Total **Rp.** **1.301.810.787**

III. HUTANG **Rp.** **----**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **1.301.810.787**



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.